PERANAN BALITBANG PROPINSI Mendukung Pembangunan Pertanian Sumatera Barat

Oleh

Firman

Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP

Email : firman@konselor.org

A. Pendahuluan.

Pembangunan pertanian memerlukan konsep dan manajemen yang tepat dan efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, tindak lanjut, menuju hasil yang positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan pertanian dimaksudkan sebagai usaha pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian masa lalu lebih menekankan tercapainya swasembada pangan khususnya beras. Kenyataannya, pendekatan pembangunan tersebut berdampak sangat minimal terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, arah kebijakan pertanian diubah sehingga lebih berwawasan agrobisnis lewat kompetisi, desentralisasi, otonomi daerah, berbasis kemanusiaan dan berkelanjutan.

Perubahan paradigma pembangunan pertanian tersebut mempunyai kendala, diantaranya : sulitnya mengubah pola pikir dari pihak-pihak terkait, terutama perubahan pola pikir birokrasi. Di sisi lain ditemukan ketidakjelasan kaitan pembaruan kebijakan dengan kebijakan sektor lain. Koordinasi lembaga terkait dalam pembangunan pertanian terasa lemah. Misalnya, lembaga yang mengurus pertanian, permukiman dan prasarana wilayah, perindustrian dan perdagangan serta logistik belum mempunyai program terpadu dan terintegrasi dalam memacu peningkatan pembangunan pertanian di daerah, sehingga produktivitas pertanian merosot, yang pada gilirannya petani kecewa dengan harga komoditas pertanian.

Pembangunan pertanian mempunyai implikasi terhadap aspek-aspek pelayanan sosial, pengenalan teknologi baru yang berdampak terhadap petani

itu sendiri. Penyuluhan pertanian telah banyak memberikan sumbangan menyampaikan berbagai inovasi pertanian kepada petani dengan segala metodenya. Revitalisasi dan reformasi penyuluhan pertanian dalam pengenalan teknologi di era agribisnis merupakan suatu tuntutan jaman yang tidak dapat dihindarkan.

Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam mempengaruhi berhasil tidaknya kesejahteraan petani ditingkatkan melalui proses penyesuaian sosial budaya. Program pembangunan di pedesaan selama ini membuat masyarakat menjadi tergantung dan kurang menumbuhkan kemandirian. Di samping itu, pemerintah terbiasa memberikan pelayanan dan fasilitas sosial yang diturunkan dari atas, sehingga mengakibatkan petani sangat tergantung pada pemerintah.

Berbagai permasalahan dialami negara dewasa ini, diantaranya menurunnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia. Penduduk Indonesia tahun 2035 diperkirakan bertambah 2 kali lipat dan jumlahnya sekarang, menjadi $\pm$ 400 juta jiwa. Peningkat pendidikan dan kesejahteraan, terjadi pula peningkatan konsumsi/kapita untuk berbagai pangan. Akibatnya, dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan dewasa ini.

Selama pemerintahan Orde Baru di Sumatera Barat dengan penerapan UU No.5 tahun 1979 menyeragamkan pemerintahan desa untuk seluruh Indonesia, dengan motif mempercepat pembangunan di pedesaan. Setelah diterapkan Perda No.13 Tahun 1983 riwayat nagari sebagai kesatuan sosial dan unit pemerintahan terendah telah berakhir di Sumatera Barat. Emeraldy Chatra (1999: 53) menjelaskan sebanyak 543 nagari dipecah menjadi 3000 an desa yang secara administrasi langsung berada di bawah pemerintah kecamatan. Eksistensi nagari tetap diakui sebagai kesatuan adat dan pemerintah membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) namun tidak berdaya dalam menggerakkan masyarakat pedesaan.

Pengalihan pemerintahan nagari menjadi desa di Minangkabau menyebabkan masyarakat membutuhkan penyesuaian kembali, sehingga menimbulkan berbagai isu-isu penting yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Pemberlakuan Undang-undang No.22 tahun 1999, Undang-undang No. 25 tahun 1999 dan Perda No.9 tahun 2000 menuntut pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat merumuskan program pembangunan pertanian sesuai dengan kebutuhan serta isu-isu yang dialami masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini pembahasannya difokuskan kepada isu-isu penting pembangunan Sumatera Barat di era otonomi dan peranan Litbang Propinsi Sumatera Barat dalam menunjang pembangunan pertanian.

Pengembangan otonomi daerah dalam bidang pertanian mensyaratkan perombakan pola interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Kalau tadinya pemerintah memposisikan sebagai pembina, maka dalam penjabaran otonomi daerah pemerintah menurunkan posisinya sebagai fasilitator dalam mengedepankan aspek kerakyatan. Secara politis institusi-institusi (pranata-pranata) yang sudah merakyat dijadikan acuan dalam mengelola permasalahan setempat. Pengembangan otonomi daerah di bidang pertanian justru harus sensitif dan mendayagunakan basis kerakyatan baik secara ekonomis maupun politis untuk kesejahteraan petani.

A. Beberapa Isu-isu Penting di Bidang Pertanian di Sumatera Barat

Dewasa ini masyarakat Sumatera Barat mengalami perubahan, peran institusi lama, khususnya lembaga-lembaga adat, tak lagi sepenuhnya mampu menjawab persoalan masyarakat dewasa ini. Sebagian Institusi baru belum efektif dan belum ditemukan dalam menggerakkan masyarakat. Upaya telah dilakukan pemerintah daerah, melakukan revitalisasi fungsi nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah pembangunan di pedesaan. Berbagai peristiwa terjadi akibat perbenturan nilai-nilai di dalam

masyarakat yang menyebabkan konflik. Isu-isu penting dalam pembangunan daerah yang ditemui sehubungan dengan hal itu menyangkut dengan :

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumatera Barat memiliki luas daratan 42.297 km² yang kekayaan alam memadai sebagai modal pembangunan. Secara geografis, Sumatera Barat memiliki tanah berkemiringan tinggi hingga sedang, mempunyai gunung-gunung, ngarai dan lembah, serta kawasan hutan yang perlu dijaga kelestariannya. Curah hujan yang tinggi dan hampir merata sepanjang tahun, merupakan salah satu potensi alamiah Sumatera Barat, namun juga merupakan ancaman apabila pengelolaan lingkungan tidak dilakukan secara bijak.

Dari total luas wilayah Sumbar, hanya sekitar 16.94% yang digunakan untuk usaha pertanian. Hal ini dapat dipahami karena kondisi fisiografi Sumbar yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar kegiatan pertanian berada di lembah-lembah atau di bagian pantai. Bagian lembah relatif subur, sedangkan bagian pantai memerlukan penanganan khusus, terutama daerah berawa-rawa dan gambut.

Dari luas usaha pertanian Sumbar seperti tersebut di atas, usaha padi sawah mencakup 5.59%, kebun/ladang (1.5%), perkebunan (7%) dan kebun campuran (2.85%) dengan komoditas utama yang dihasilkan adalah padi sawah, kelapa sawit, karet, kelapa, kayu manis, kopi, coklat, dan gambir.

Sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 43% - 72% lebih, akan tetapi hanya mampu menyumbang sekitar 29% - 34% lebih terhadap

PDRB propinsi Sumbar. Bandingkan dengan sektor industri yang hanya menyerap tenaga kerja berkisar antara 3% - 15%, akan tetapi mampu menyumbang antara 7% - 18%. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dan efisiensi usaha pertanian di Sumbar masih rendah. Persoalan ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya manajemen usaha dan masukan teknologi dalam usaha pertanian. Disamping itu, relatif kecilnya usaha pertanian, baik tanaman pangan, maupun perkebunan, peternakan, dan perikanan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efisiensi usaha pertanian. Kondisi ini pun memberi signal yang jelas, bahwa peranan sektor pertanian dalam pembangunan masih dapat ditingkatkan melalui pemasyarakatan teknologi dan pemberdayaan petani yang tepat dan kondusif.

Selain sebagai kawasan konservasi untuk pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, semua taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung tersebut juga memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang tidak ternilai, karena kekayaan yang dilindungi tersebut juga merupakan potensi pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Potensi hutan cukup besar, selain untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, cadangan air, juga memberikan manfaat ekonomi yang besar sebagai penghasil berbagai komoditi seperti kayu, damar, rotan, manau, gaharu dan lain-lain yang tidak hanya digunakan untuk keperluan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, tetapi hasil hutan dan hasil industri pengolahannya merupakan penyumbang terbesar ekspor Sumatera Barat.

Berbagai kendala dialami Sumatera Barat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian, diantaranya

- a. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan

Sebagian besar wilayah propinsi Sumatera Barat masih hutan belantara dan tanah berkemiringan tinggi, sehingga lahan yang dapat dibudidayakan terbatas. Di Kodya Padang, 60.28% dari lahan yang efektif untuk budidaya telah beralih fungsi menjadi lahan terbangun dan 70% dari lahan terbangun tersebut adalah untuk perumahan (Tim Survey, 1997). Di Kabupaten Pasaman, Sawahlunto Sijunjung, dan Padang Pariaman, areal yang amat potensial untuk persawahan telah digunakan untuk perkebunan. Disamping itu, lebih terkebelakangnya sistem pertanian di kawasan perkotaan dibandingkan kabupaten juga merupakan masalah yang harus dipecahkan agar keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah dapat dilakukan.

Secara teknis, kawasan vulkanik dan dataran tinggi merupakan daerah sangat potensial sebagai sentra hortikultura dan sentra pembibitan aneka komoditas. Secara fisiologis, bibit yang dihasilkan di kawasan dataran tinggi viabilitasnya lebih tinggi dibandingkan di dataran rendah. Akan tetapi kedua peluang strategis tersebut belum dimanfaatkan secara baik.

Persoalan lain adalah masalah cemaran senyawa kimia dari sistem pertanian di dataran tinggi. Dominasi usahatani sayuran di dataran tinggi, yang dicirikan oleh pemakaian pestisida dan pupuk yang tinggi, tidak hanya mencemari daerah sekitarnya, akan mencemari kawasan dibawahnya. Kepunahan dan penurunan populasi ikan dan satwa lainnya, disamping produk pertanian sudah menjadi masalah yang sering terjadi.

b. Sumberdaya Hutan dan Air

Penggunaan tanah di Sumbar terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 1.203.270 ha—termasuk kawasan suaka alam (569.690ha) dan kawasan budidaya (2.456.970 ha) termasuk hutan produksi terbatas

215.250 ha, hutan produksi 398.370 ha, hutan produksi konversi 137.680 ha, pemukiman 12.600 ha, perkebunan 461.570 ha (yang sudah diusahakan 269.400 ha dan yang sudah diperuntukkan 132.170 ha), dan penggunaan lainnya 1.287.740 ha.

Selama dua dekade ini, hutan Sumbar telah dieksploitasi secara besar-besaran dalam rangka mengejar devisa negara. Program reboisasi pun kurang efektif mengembalikan fungsi hutan, disamping disebabkan kegagalan operasional di lapangan, juga akibat sangat panjangnya waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi hutan semula, yaitu 50 – 100 tahun.

Kehilangan sebagian tegakan hutan itu juga terlihat dari nilai ekspor hasil hutan Sumatera Barat cenderung menurun karena sumberdaya kayu yang dapat diperdagangkan dari hutan produksi sudah habis. Pengambilan kayu diduga sudah masuk kedalam kawasan lindung, bahkan kawasan cagar alam. Data dari citra satelit yang dikeluarkan oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi tanah melaporkan bahwa dari 200.000 ha kawasan hutan yang difoto melalui citra satelit yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas, memperlihatkan bahwa 22% dari hutan lindung telah ditebang selama satu dekade belakangan, sedangkan hutan produksi telah terbagi habis kepada sejumlah pemegang HPH (Propeda Sumbar, 2001).

Persoalan lainnya adalah eksploitasi hasil hutan belum kelihatan manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan didalam kawasan hutan. Bahkan, mereka cenderung makin miskin karena akses mereka terhadap hasil hutan dibatasi oleh adanya Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Secara khusus, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi kehutanan mencakup aspek

aspek sebagai berikut: 1) menurunnya produksi kayu, 2) menurunnya kualitas hutan, 3) menurunnya kapasitas hutan sebagai penyangga tata air regional, 4) dominasi masyarakat miskin sekitar hutan, dan 5) lemahnya pengamanan hutan, dan 5) lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pencurian kayu dan pengrusakan hutan.

B. Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam Menunjang Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat.

Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat menunjang pembangunan pertanian merupakan bagian dari sistem pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah dan nasional. Properda Sumatera Barat menggariskan sasaran pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Sumatera Barat adalah tercapainya kemampuan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis dan inovatif, agar mampu mengembangkan kapasitas dan daya saing ekonomi, serta memperkuat kemandirian dan keunggulan Sumatera Barat dalam percaturan regional, nasional dan global.

Selanjutnya Propeda Sumatera Barat menuangkan 7 butir pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu :

- 1) Mensinergikan potensi daerah, adat dan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Melahirkan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi yang terampil, kreatif, motivatif, disiplin dan bertanggungjawab.

- 3) Mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebarluasan informasi bisnis dan teknologi serta permodalan.
- 4) Meningkatkan penguasaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 5) Meningkatkan daya saing produk berbasis sumberdaya lokal
- 6) Meningkatkan keterlibatan lembaga pendidikan formal dan informal, lembaga penelitian serta meningkatkan peran pakar daerah dan
- 7) Memfasilitasi reorientasi peningkatan peran lembaga pendidikan formal, informal dan pesantren.

Penjabaran program Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi sesuai dengan SK.Mendagri dan OTODA nomor 40 tahun 2000 tentang penelitian dan Pengembangan serta Perda Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat, yaitu : Membantu Gubernur dalam Menyelenggarakan Pemerintah Propinsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam rangka pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi Sumatera Barat salah satu kiat dalam merancang optimalisasi Balitbang adalah mengarahkan program dan kegiatan untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi strategis sebagai berikut :

- 1) Penetapan kebijakan litbang dalam bentuk Master Plan Penelitian dan Pengembangan (R&D) Propinsi sebagai acuan umum bagi program

dan kegiatan litbang di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan lembaga dan pelaku litbang di Sumatera Barat.

- 2) Membantu penajaman arah dan pelaksanaan kajian-kajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Dinas/instansi terkait di Sumatera barat, dimana kegiatan dimaksud juga menjadi bagian integral dari jaringan litbang (network research) yang dilakukan Sumatera Barat.
- 3) Memformulasikan Terms of Reference (TOR) untuk program-program litbang strategis untuk core program bagi litbang unggulan tahunan daerah, sekaligus menyelenggarakan mekanisme review atau seleksi proposal terbaik mengikuti mekanisme pengajuan Riset Unggulan Terpadu. Dalam pelaksanaannya, Balitbang Propinsi Sumatera Barat dibantu oleh pakar perguruan tinggi (Unand, UNP, IAIN) dalam bidang Pertanian, Peternakan, Ekonomi, Pemerintahan, Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya.
- 4) Membangun data base SDM, fasilitas riset, hasil-hasil riset dan program, tahunan pelaku R&D Sumatera Barat, sekaligus melakukan review dan ekstraksi Outpun dan Outcome hasil penelitian dan pengkajian, sebagai bahan kebijakan pembangunan dan evaluasi kinerja litbang.
- 5) Menyelenggarakan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi atau Bursa Iptek secara priodik dengan sasaran yang luas (DPR, Pemerintah, Peneliti, Penyuluh, Pengusaha serta pengguna dan

pengambil kebijakan lainnya dalam rangka mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penumbuhan iklim dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 6) Mengembangkan mekanisme pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan, sebagai suatu mekanisme untuk meningkatkan sinergi, kecepatan rekayasa dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menghindari tumpang tindih, lebih komprehensifnya output dan outcome hasil-hasil litbang dalam waktu cepat, sekaligus sebagaiantisipasi dari keterbatasan sumber daya pelaku litbang apabila dilaksanakan secara parsial.

Kebijakan yang diambil Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah

- 1) Meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas dan motivasi peneliti dalam pengembangan dan pengusaha serta penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Meningkatkan pengembangan nilai-nilai Iptek dan membentuk budaya Iptek sebagai bagian dari budaya masyarakat.
- 3) Mendorong upaya pemasyarakatan Iptek melalui pendirian Infotek (Warintek)
- 4) Meningkatkan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan dari sumber pemerintah, dunia usaha dan kerjasama dengan pihak lain.
- 5) Menerapkan kebijakan satu pintu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

- 6) Meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya kelembagaan penelitian dan pengembangan.
- 7) Memantapkan sistem dan mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi melalui forum komunikasi peneliti dan cendekiawan Sumatera Barat.

Tugas dan fungsi Balitbang Propinsi Sumatera Barat akan terlaksana apabila mempunyai dan menghimpun hasil penelitian dan pengembangan dengan kriteria : (a) mampu mempercepat pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan, (b) dapat diaplikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, (c) menumbuhkan daya saing daerah dalam memproduksi barang dan jasa dalam rangka menghadapi tantangan dan persaingan global dan (d) merubah sikap dan perilaku masyarakat yang lebih reponsif dalam mempercepat proses pembangunan.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, kebijakan dan program pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat , adalah : (1) menentukan arah dan prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan termasuk di bidang pertanian, (2) melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan termasuk di bidang pertanian, (3) meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan termasuk di bidang pertanian, (4) menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui publikasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru, termasuk yang berhubungan dengan bidang pertanian, (5) mengembangkan forum komunikasi/diskusi antar peneliti dan pakar serta

aparatur Pemerintahan Sumatera Barat, (6) meningkatkan pengembangan sumberdaya kelembagaan penelitian dan pengembangan.

Penjabaran dan operasionalisasi kebijakan dan program tersebut di atas, program strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat adalah :

- Pengembangan kapasitas institusi (*institutional Capacity Building*) dari penyelenggara pemerintahan dalam lingkungan pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam upaya melaksanakan prioritas pembangunan daerah termasuk di bidang pertanian, mencakup : pengembangan SDM, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penataan struktur dan aparatur pemerintahan. Program strategis ini bertujuan untuk membantu dan/atau memberikan masukan kepada kelembagaan Pemerintah Propinsi dalam : (1) pengembangan kemampuan aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan, (2) penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan wewenang dan sumber daya tersedia dan prioritas pembangunan daerah, (3) penyempurnaan program pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan, (4) peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian lainnya dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kegiatan pembangunan.

Bidang kajian pembangunan strategis, antara lain adalah : (1) pengembangan SDM, agama dan teknologi, (2) pengurangan tingkat kemiskinan, (3) pengurangan tingkat pengangguran, (4) peningkatan tingkat kesehatan masyarakat, dan (5) pengembangan ekonomi kerakyatan dengan kelestarian lingkungan, (6) peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta budaya Minangkabau, (7) peningkatan pemerataan hasil pembangunan, (8) pengembangan sarana-prasarana pembangunan. Hasil pembangunan strategis ini akan dilanjutkan pengembangannya Pemerintah Kabupaten dan Kota oleh Kelembagaan (Dinas/Instansi) terkait. Sehingga diharapkan adanya komunikasi,

koordinasi, konsolidasi , sinkronisasi atau keterpaduan rogram/kegiatan antara propinsi dengan Kabupaten/Kota serta dapat mendukung percepatan proses otonom daerah. Di samping akan terciptanya sinergi kegiatan pembangunan sesuai dengan wewenang masing-masing pemerintah (Propinsi, Kabupaten dan Kota)

2. Pengembangan wilayah secara terpadu (Integrated regional development) berdasarkan kajian spasial sesuai dengan wewenang dan kesepakatan antara propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kajian spasial ini merupakan kegiatan penelitian kebijakan dan perencanaan (research policy and planning) yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya tersedia yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan strategik bagi lembaga perencanaan dalam memformulasikan program pembangunan terpadu di daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota). Kegiatan ini diharapkan juga dapat mendukung percepatan proses otonomi daerah dan kelancaran program pembangunan.

Pendekatan kajian spasial ini anatara lain dilanjutkan dalam bentuk pengembangan kawasan pembangunan prioritas (Misalnya kawasan pantai, kawasan pergunungan, kawasan komoditi unggulan dan kawasan pembangunan strategis lainnya, seperti bandara Ketaping , kawasan lahan kritis/translokal dan lainnya.

Bekaitan dengan hal itu, kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat dalam pembangunan adalah :

1. Menyusun arah, prioritas Bidang Penelitian dan pengembangan .
2. Menyusun agenda kegiatan penelitian dan pengembangan
3. Menyusun TOR (kerangka Acuan) dan seleksi usulan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antar dinas/intansi dan Kabupaten/Kota
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang prioritas pembangunan.
6. Melakukan diskusi dan seminar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
7. Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.
8. Melakukan diskusi/seminar Multi disiplin masalah pembangunan aktual/ strategis dalam pembangunan
9. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan..
10. Memberikan penghargaan peneliti berprestasi
11. Mengembangkan Warintek (Warung Informasi dan Teknologi) mendorong pelaksanaan pembangunan.
12. Mengembangkan perpustakaan dan hasil inovasi teknologi yang mendukung pembangunan.
13. Membangun sarana dan prasarana kelembagaan penelitian dan pengembangan.
14. Mengembangkan kemampuan fungsional peneliti untuk melaksanakan pengkajian dalam pengembangan.

D. Penutup

Pemahaman isu-isu penting dalam pembangunan dijadikan dasar dalam menetapkan prioritas kegiatan penelitian bagi Balitbang Propinsi Sumatera Barat. Pada gilirannya nanti kebijakan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat .

Balitbang Propinsi Sumatera Barat berperan dalam membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dalam bidang

penelitian dan pengembangan termasuk bidang pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah membantu merumuskan atau menyusun kebijakan , program dan rencana kegiatan pembangunan (Dinas/Instansi) guna meningkatkan efektifitas, efesiensi dan produktifitas pelaksanaan pembangunan.

Daftar Kepustakaan

Agus Lilik Setiawan (2001) : Webmaster@m-jiesp-l-p.com. Web Company. 2001.

Arlus dan Suparno. 2002. Pengelolaan Potensi Pesisir dan Kelautan Sumatera Barat. Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Pemecahan Masalah Aktual Pembangunan Daerah, di Balitbang Sumbar, tanggal 14 September 2002.

Balitbang Propinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2001 – 2005. Pemda Sumbar.

Bappeda Sumbar. 2000. Profil dan Analisis propinsi Sumatera Barat tahun 2000. Pemda propinsi Sumbar.

BPS. 2001. Sumatera Barat Dalam Angka. West Sumatra in Figures. Kerjasama Bappeda Propinsi Sumbar dengan BPS propinsi Sumbar.

Dinas Pertambangan. 2001. Sumberdaya Bahan Galian Propiinsi Sumatera Barat. Pemda Propinsi Sumatera Barat.

Elfindri. 2002. Ekonomi Patron-Client. Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Andalas University Press.

Handayani, Soewondo (1993) : Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung.

Korten, C David (1983) : Bureaucracy and the Poor Closing the Gap. New York : Kumarian Press.

Kuntowidjojo (1986) : Prospek Pedesaan. Yogyakarta : P3PK UGM.

Mubyarto (1984) : Strategi Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta :P3PK UGM

Retraubun, A. 2000. Konsep dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil dimasa datang. Makalah disampaikan pada pelatihan Dosen Muda Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan IPB Bidang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” di Kampus IPB Darmaga, 20-25 Maret 2000.

Retraubun, A. 2000. Konsep dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil dimasa datang. Makalah disampaikan pada pelatihan Dosen Muda Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan IPB Bidang “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” di Kampus IPB Darmaga, 20-25 Maret 2000

Tjiptoherjanto Priyono, (1983) : Ekonomi Indonesia Hubungan dan Ketergantungan. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun. 2000. Kebijakan pemanfaatan wilayah sumberdaya pesisir dan pantai Sumatera Barat. Kerjasama Direktorat Pesisir Pantai, Dirjen Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Dep. Kelautan dan Perikanan dengan Pusat Penelitian Pengembangan Perikanan UBH.

Tim Survei. 1997. Laporan Final Survei, analisa, dan rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian sawa di Kotamadya Padang. Balai Pengkajian Pertanian Sukarami.

MAKALAH

PERANAN BALITBANG PROPINSI

MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN

DI SUMATERA BARAT

Oleh

Dr. Firman.MS

NIP. 131 584 113

**Disajikan dalam Seminar Hasil-hasil Penelitian dan
Pengajian Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Sumatera
Barat. Sukarami Tanggal 26-7 Januari 2004**